

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)**

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGETS IN
INCREASING THE SUCCESS OF VILLAGE DEVELOPMENT (The Study In The Village
Agreed To The Plampang Subdistrict, Sumbawa District)**



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTERASI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah di setujui untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Agustus 2019

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



(Dr.H.Ibrahim Abdullah,SE.,MM)
NIDN.0830125501

Dosen Pembimbing II



(Dedy Iswanto, ST., MM)
NIDN.0818087901

Mengetahui,

Program Studi Administrasi Publik

Ketua



(E. Sibad Hidayat, S.AP., M.AP.)

NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Sepakat
Kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa)

OLEH:

RIZAL SUHAERI
NIM. 21511A0068

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Urusan Publik

Telah disetujui oleh Tim Penguji pada tanggal

seperti tertera dibawah ini

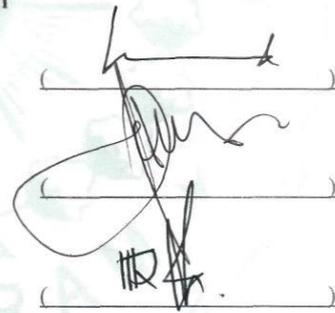
Mataram, 08 Agustus 2019

Tim Penguji

1. **Dr. H., Ibrahim Abdullah, SE., MM**
NIDN. 0830125501

2. **Dedy Iswanto, ST., MM**
NIDN. 0818087901

3. **M. Taufik Rachman, SH., MH**
NIDN. 0825078701



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Amil, M.M.
NIDN. 0831126204

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau dokter, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di perguruan tinggi lainnya).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 8 Agustus 2019



RIZAL SUHAERI
NIM. 21511A0068

Motto dan Persembahan

MOTTO

Orang yang cerdas adalah orang yang mau introspeksi diri dan beramal untuk bekal setelah mati. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada ALLAH SWT.

{HR. Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah}

Jangnalah menjadi yang pertama jika hanya membuatmu sombong, tetapi jadilah yang terbaik jika itu mampu membuatmu bersyukur.

{Nita Ayu Oktaviani}

PERSEMBAHAN

Dengan segala Puja dan Puji Syukur Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan karunianya maka Skripsi ini Dapat dibuat selesai pada waktunya. Puji Syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Penguasa Alam yang meridhai dan mengangabulkan segala Do'a.

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang menjadi motivator dalam pencapaian tujuan hidup ini. Kalian adalah pemberi inspirasi terhebat di dunia, pemberi kasih sayang yang terkuat dan terkokoh, yang tak pernah bosan menyebutkan namaku dalam setiap sujud dan do'a kalian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Hirobbilalamin....

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, Tuhan yang Maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha penyayang yang kasih dan sayangnya tiada terbilang kepada kita sekalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA”**.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini.

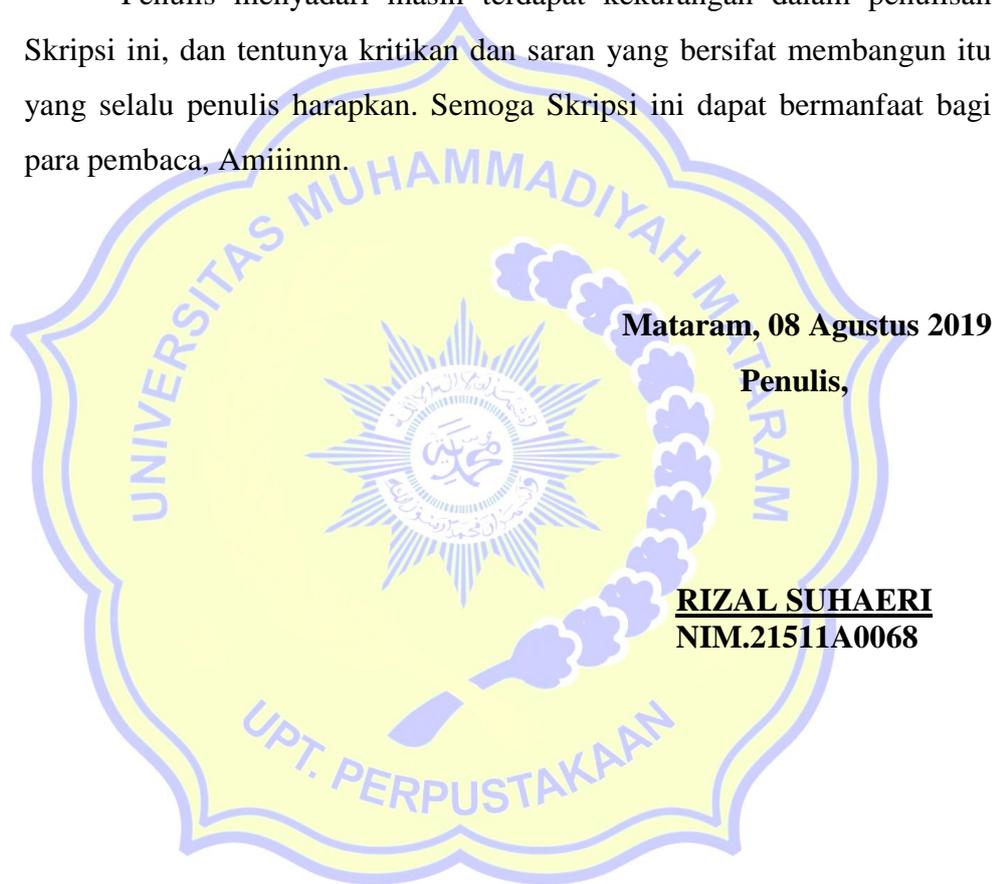
Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. M. Junaidi MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah sekaligus sebagai penguji Hasil Skripsi saya ini.
3. Bapak Rahmad Hidayat S.Ap.,M.Ap selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik.
4. Bapak Dr.H.Ibrahim Abdullah.SE.,MM sebagai Dosen Pembimbing Pertama Dalam Penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dedy Iswanto.ST.,MM Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang senantiasa telah banyak membimbing dan mendampingi dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua ku tersayang Bapak M.Suaf dan Ibunda Siti Hajar serta saudara-saudari ku tercinta Teti Suhaera, Tita duwi Okta Suhara, Risqi

Novan Irawansah, Fajrul Rizki, Yogi Prasetio, Lalu Wahyu Ilham Dani, Samsul Hidayat, Ahmad Bihaqi, Oktriliani Glora, Devi Febrian Aulia yang selalu mendukung dan mendoakan penulis

7. Para Dosen yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, teman-teman seperjuangan dan pihak luar yang tidak tanggung-tanggungnya membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Amiiinnn.



ABSTRAK

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA

Rizal Suhaeri¹,H.Ibrahim Abdullah²,Dedy Iswanto³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan faktor penghambat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa .

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Peneliti menggunakan Triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa mengunaka Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 6, Pengelolaan Keuangan Desa faktor penghambat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa adalah masalah sosial budaya,masalah ekonomi, dan masalah geografis.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Anggaran Desa.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE INCOME AND SHOPPING BUDGET TO IMPROVE THE SUCCESS OF VILLAGE DEVELOPMENT

Rizal Suhaeri¹, H. Ibrahim Abdullah², Dedy Iswanto³

This study aims to find out how the implementation of the village income and expenditure budget in increasing the success of village development and the inhibiting factors in the implementation of the village income and expenditure budget in increasing the success of village development.

This research method is a descriptive study with a qualitative approach. Qualitative descriptive research is research that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually, and accurately about facts or phenomena that occur in the field. Data collection is done by Observation, Interview, and Documentation Techniques. Researchers use source triangulation to check the validity of research data. Data analysis in this study used three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the implementation of the village income and expenditure budget in increasing the success of village development using Permendagri No. 113 of 2014 Chapter I Article 1 Paragraph 6, Management of Village Finances Inhibiting the implementation of the village income and expenditure budget in increasing the success of village development is a socio-cultural, economic, and geographical problem.

Keywords: Implementation, Village Budget.

UPT. PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti.....	5
1.4.2 Manfaat Akademis	5
1.4.3 Manfaat Teoritis	5
1.4.4 Manfaat Praktis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Pustaka	10
2.2.1 Definisi Keuangan Desa	10
2.2.2 Definisi Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
2.2.3 Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
2.2.4 Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes)	14
2.2.5 Pendapatan Desa.....	15
2.2.6 Belanja Desa	17
2.2.7 Pembiayaan Desa	18
2.2.8 Proses Pelaksanaan Pembangunan	20

2.2.9	Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Desa	22
2.3	Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian	31
3.3	Penentuan Informan	31
3.4	Jenis dan Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Teknik Analisis Data	34
3.7	Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran umum lokasi penelitian	39
4.1.1	Profil Kantor Desa Sepakat	39
4.1.2	Visi Dan Misi	39
4.1.3	Dasar Hukum Pemerintahan Desa	40
4.1.4	Struktur Organisasi	41
4.1.5	Tugas Dan Fungsi Kantor Desa Sepakat	43
4.1.6	Fungsi Anggaran Di Desa Sepakat	50
4.1.7	Anggaran Sebagai Alat Perencanaan	51
4.1.8	Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik	52
4.1.9	Anggaran Sebagai Alat Motivasi	53
4.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Desa	53
4.2.1	Msalah Sosial Budaya	53
4.2.2	Masalah Ekonomi	55
4.2.3	Masalah Geografis	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Menurut R.H. Unang Soenardjo (2005: 126) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemimpin desa mampu membimbing dan mendorong masyarakat untuk selalu berpikir maju dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Salah satu tugas pokok Desa adalah membangun imfratraktur Desa seperti Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan

pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat.

Menurut Kartasasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti mekanisme pembangunan desa yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Untuk melaksanakan program-program pembangunan di butuhkan biaya atau dana, Dana desa berasal dari pendapatan asli desa dan ada dana yang berasal dari pemerintah. Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
7. Hibah atau sumbangan

Maka dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana, pelaksanaan anggaran atau belanja desa apakah telah mencapai tujuan yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP), Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menyusun dan membuat penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang dijadikan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa .

1.3 Manfaat Penelitian

Setiap diadakannya suatu Penelitian Pasti mempunyai manfaat sehingga bisa dinikmati hasil akhirnya. Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang antara lain :

1.4.1. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya proposal ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, serta untuk menambah

wawasan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan juga sebagai panduan untuk menyusun skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.4.2 Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi penelitian, memberikan informasi tambahan dan sebagai bahan perbandingan penelitian lain.

1.4.3 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan pada desa sepakat.

1.4.4 Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk untuk masyarakat supaya tau bagaimana cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan desa. Serta tidak adanya ketimpangan antara desa dan masyarakat dalam permasalahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Unsur Penelitian	Uraian
1	Nama & Tahun	Arifuddin Mas'ud, Safaruddin, Falziah (2017)
	Judul	Persepsi pengelola keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dikecamatan mawasangka kabupaten buton tengah
	Metode Penelitian	Deskriptif kuantitatif
	Hasil Penelitian	Data persepsi pengelola keuangan desa dalam mewujudkan transparansi yang diambil dari kuesioner yang berisi 10 butir soal terbagi dalam 3 indikator yaitu publikasi pelaksanaan APBDes sebanyak 3 butir soal, penyampaian informasi yang jelas sebanyak 3 butir soal dan sosialisasi pelaksanaan APBDes sebanyak 4 butir soal, dengan 5 alternatif jawaban pada rating skala 1 s/d 5, dengan jumlah responden sebanyak 85 responden sehingga didapatkan skor ideal maksimal ($85 \times 10 \times 5 = 4250$) dan total skor diperoleh sebesar 3653. Dari hasil jawaban responden mengenai persepsi perangkat desa atas variabel transparansi didapatkan persentase kecenderungan jawaban responden sebesar 85,95 %. Apabila data dibagi 5 ketegori yaitu sangat buruk, buruk, cukup, baik dan sangat baik maka berdasarkan persentase kecenderungan jawaban responden mengenai persepsi perangkat desa pada variabel transparansi masuk dalam ketegori sangat baik yaitu pada skala interval 81% sampai dengan 100%.
	Perbedaan & Persamaan	Perbedaan

		<p>Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data. Lokasi penelitian.</p> <p>Persamaan</p> <p>Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Sama-sama membahas keuangan desa.</p>
2	Nama & Tahun	NOVA SULASTRI (2016)
6	Judul	<p>Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna</p>
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini dilakukan di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Lakapodo adalah sebuah desa kecil yang terletak di Propinsi Sulawesi Tenggara. Desa Lakapodo terletak +/- 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten Muna, dan +/- 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Watopute dengan luas wilayah 12,23 km, dengan batasan-batasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sawerigadi 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wakadia 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dana 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matarawa <p>Iklim di Desa Lakapodo, sebagaimana di Desa-Desa lain di Indonesia beriklim tropis, pancaroba dan penghujan, hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang ada di Desa Lakapodo. Desa Lakapodo terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Lakapodo dan Dusun Wasikondu yang memiliki penduduk 1078 jiwa, dengan jumlah KK=282, RTM = 233 KK, RTSM=</p>

		<p>96 KK. Mata pencaharian warga Desa Lakapodo adalah petani, selain itu warga Desa Lakapodo berprofesi sebagai pedagang, tukang, peternak, Pegawai Negeri Sipil(PNS). Sebanyak 65 % Desa Lakapodo tergolong sebagai KK miskin dengan penghasilan rata-rata Rp 20.000 per hari. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan No. Dusun Jumlah Jiwa Kepala Keluarga L P Total 1 Lakapodo 303 204 507 127 2 Wasikondu 350 221 571 155 Jumlah Total 653 425 1078 282 Sumber: Kantor Desa Lakapodo Tahun 2015</p> <p>Dari tabel jumlah penduduk diatas menunjukkan bahwa, Desa Lakapodo terdiri dari 2(Dua) dusun, yaitu Dusun Lakapodo dan Dusun Wasikondu, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1078 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 507, dan perempuan berjumlah 571, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 282 jiwa. Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lakapodo No Tingkat Pendidikan Orang (Jiwa) 1 TT SD 140 2 SD 206 3 SMP 133 4 SMA 105 5 DIPLOMA 24 6 SARJANA 44 Sumber : Kantor Desa Lakapodo Tahun 2015</p> <p>Dari tabel tingkat pendidikan diatas menunjukkan bahwa, pendidikan masyarakat Desa Lakapodo masih sangat rendah dimana masyarakat yang Tidak Tamat SD sebanyak 140 orang, dan yang tamat SD sebanyak 206, SMP sebanyak 133 orang, SMA sebanyak 105 orang dan masyarakat yang jenjang pendidikan Diploma sebanyak 24 orang, serta masyarakat yang jenjang pendidikan Sarjana mencapai 44 orang.</p>
	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan</p> <p>Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data. Lokasi penelitian.</p> <p>Persamaan</p>

		Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama membahas pembangunan dan dana desa.
3.	Nama dan tahun	Kisman Karinda (2018)
	Judul	Pengaruh Koordinasi Kepala Desa Terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan Di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil Penelitian	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 35 orang responden di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden dalam memberikan informasi mulai dari jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Jenis kelamin responden terdiri atas laki-laki dan perempuan guna mengetahui proporsi dari Pengaruh Koordinasi Kepala Desasebagai variable bebas (X) terhadap Kinerja Kepala Desa sebagai Kinerja Kepala Desa variable terikat.Dimana jenis kelamin responden berjumlah 35 jiwa, 26 orang jenis laki-laki dengan tingkat persentasi 74.28% dan jenis kelamin perempuan 9 orang dengan tingkat persentasi 25.71%. Sedangkan ,tingkat Umur/ usia dari responden. Sangat penting untuk mengetahui kemampuan aparat dalam menilai Pengaruh Koordinasi Kepala Desaterhadap Kinerja Kepala Desa, diinterpretasikan bahwa kebanyakan responden penelitian berusia</p> <p>17-30 tahun yaitu sebanyak 11 orang responden atau 31.42 % dan 31 - 40 tahun sebanyak 9 orang responden atau (25.71 %), dan 4150tahun keatas sebanyak 9 orang responden atau (25.71%). Sedangkan yang berumur 50 tahun keatas ada 6</p>

		<p>orang responden atau (17.14%). Ini berarti bahwa masyarakat yang mengetahui Koordinasi Kepala Desasebagai variable bebas (X) dan Variabel Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) dapat dikatakan usia yang produktif. Adapun Pendidikan sangat penting untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap dalam Koordinasi Kepala Desasebagai variable bebas (X) dan Variabel Tingkat Keberhasilan Pembangunan di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan kebanyakan responden penelitian tingkat pendidikan yaitu SLTA (sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebanyak 5 orang responden atau 55.55% dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 4 orang responden atau (44,44 %), dan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 0 orang responden atau (0%). Sedangkan yang berumur Diploma / Sarjana 0 orang responden atau (0 %). Ini berarti bahwa masyarakat yang mengetahui Pengaruh Koordinasi Kepala Desasebagai terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan desa di desa Lalong, masyarakat dapat dikatakan tingkat pendidikannya masih sangat minim. Penelitian ini menggunakan dua variable yakni variable Koordinasi Kepala Desasebagai variable bebas (X) dan Variabel Tingkat Keberhasilan Pembangunan Desa sebagai variable Terikat dengan total indikator dari (X) Koordinasi Kepala Desa dengan indikatornya berjumlah 9 (Sembilan) dan variable Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) indikator nya berjumlah 6 (enam) Indikator.</p>
	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan</p> <p>Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data.</p> <p>Lokasi penelitian.</p>

		<p>Persamaan</p> <p>Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Sama-sama membahas pembangunan desa.</p>
--	--	---

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Definisi Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam BAB I Pasal 1 Ayat 10 bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2.2.2 Definisi Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Thantawi (2013) Pengelolaan adalah suatu proses/kegiatan/usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang-orang lain. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 6, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, pada BAB II Pasal 2 Ayat 1 dan 2, tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Maka dari itu dalam mengelola keuangan pemerintah harus menerapkan asas tersebut dengan sungguh-sungguh karena hal tersebut merupakan amanat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. yang di dalamnya terdapat tahap perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

2.2.3 Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan, untuk:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan APBDes.
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa,
- b. Bendahara Desa, dan
- c. Kepala Seksi.

PTPKD sebagaimana disebut dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab III Pasal 5, Pasal 6, Dan Pasal 7 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. tugas dari Sekretaris Desa yaitu:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Kepala Seksi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

2.2.4 Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Ulum (2008:98) Anggaran Publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Halim dan Kusufi (2016:48) mengidentifikasi bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
- d. Anggaran sebagai alat politik

- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
- g. Anggaran sebagai alat motivasi
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 1 dijelaskan bahwa APBDes terdiri atas:

- a. Pendapatan desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- b. Belanja desa, diklasifikasi menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- c. Pembiayaan desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2.2.5 Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. Pendapatan desa, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.
2. Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;

- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
3. Hasil usaha desa, antara lain:
 - a. Hasil bumdesa;
 - b. Tanah kas desa.
 4. Hasil aset, antara lain:
 - a. Tambatan perahu;
 - b. Pasar desa;
 - c. Tempat pemandian umum;
 - d. Jaringan irigasi.
 5. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 6. Kelompok transfer, terdiri atas jenis: Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - c. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
 7. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

8. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain:
 - a. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.2.6 Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

1. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Belanja tak terduga.
2. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rkpdesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan jasa; dan
 - c. Modal.

3. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. belanja pegawai dianggarkan dalam:
 - a. Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - c. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
4. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Bahan/material;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak/penggandaan;
 - f. Sewa kantor desa;
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. Makanan dan minuman rapat;
 - i. Pakaian dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Upah kerja;
 - l. Honorarium narasumber/ahli;
 - m. Operasional pemerintah desa;
 - n. Operasional badan permusyawaratan desa;

- o. Insentif RT/RW;
- p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

2.2.7 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas:

1. Pembiayaan desa, terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan pembiayaan, mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
3. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa.

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan dalam Bab V Pasal 20 s/d 42 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut

harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. berikut penjelasan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa.

2.2.8 Proses pelaksanaan pembangunan

1. Perencanaan

Pada Pasal 20 Permendagri No. 113 tahun 2014, tentang Perencanaan mengatur bahwa:

- a. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan

Pada Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24, tentang Pelaksanaan yang mengatur bahwa:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dilanjutkan pada pasal 25, yang mengatur bahwa:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Pada pasal 26 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengatur bahwa :
 - 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan baban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - 2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pada pasal 27 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengatur bahwa:

- 1) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

2.2.9 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Desa

1. Masalah Sosial Budaya

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui

seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan.

2. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Di Pedesaan

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif

sama, sehingga transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu desa relatif kecil. Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar desa dan akan menumpuk di desa. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang lebih baik.

3. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan Di Pedesaan

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas

ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

2. Masalah Ekonomi

Jika di daerah perkotaan geliat perekonomian begitu fenomenal dan pantastis. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana geliat perekonomian berjalan lambat dan hampir tidak menggairahkan. Roda perekonomian di daerah pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian (dalam arti luas : perkebunan, perikanan, petanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan produk

turunannya). Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian jumlah dan ragamnya masih relatif sangat terbatas.

Aktivitas perekonomian yang ditekuni masyarakat di daerah pedesaan tersebut sangat rentan terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu produk (terutama produk pertanian) yang berasal dari daerah pedesaan dapat mencapai harga yang begitu tinggi dan pantastik. Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang memadai. Banyak diantara mereka memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, yang disebut dengan istilah petani gurem. Lebih ironis lagi, sebagian dari penduduk di daerah pedesaan yang malah tidak memiliki lahan pertanian garapan sendiri. Mereka berstatus sebagai petani penyewa, penggarap atau sebagai buruh tani.

Petani penyewa adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menyewa lahan pertanian milik orang lain. Petani penggarap adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau lainnya. Buruh tani adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan bekerja sebagai buruh yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan memperoleh upah atas pekerjaannya.

3. Masalah Geografis

Di Indonesia mempunyai tingkat kesuburan tanah yang berbeda disetiap wilayah. Tingkat kesuburan tanah juga sangat berpengaruh dalam pembangunan desa, desa yang mempunyai keadaan tanah yang subur cenderung akan mempengaruhi hasil tani yang akan dihasilkan. Semakin baik dan banyak hasil tani yang dihasilkan oleh desa tersebut maka akan sangat mempengaruhi dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Semakin besar pendapatan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi didesa tersebut akan semakin baik.

Letak wilayah desa juga sangat mempengaruhi dari pembangunan desa itu sendiri. Desa yang letak wilayahnya lebih strategis yang dalam hal ini dekat dengan peradaban kota akan berbeda dengan desa yang letaknya sulit dijangkau. Desa yang letaknya sulit dijangkau akan cenderung akan mengalami pembangunan ekonomi yang lambat. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses pemerintah dan dunia luar untuk menjangkanya. Jadi letak desa yang strategis juga sangat berpengaruh dalam pembangunan desa itu sendiri. Adapun Solusi dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan desa di antaranya adalah :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan, mengadakan penyuluhan pendidikan terhadap masyarakat agar tercipta generasi penerus yang memiliki pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah pedesaan akan arus transportasi orang dan barang keluar dan masuk dari dan ke daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Karena salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah pedesaan dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, danau, sungai dan udara), dan sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat udara dan sebagainya).
- c. Peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembangunan desa ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pembangunan desa dalam aspek fisik.
- d. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana dan sarana yang diperlukan, tetapi proses pembangunan desa memerlukan waktu yang panjang, banyak pengorbanan, dan bertalian dengan banyak pihak dalam masyarakat termasuk masyarakat di daerah pedesaan. Proses pembangunan desa dimulai dari tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. pada semua tahapan

pembangunan desa ini terjadi keterlibatan partisipasi aktif masyarakat daerah pedesaan.

1) Tingkat Pendidikan dan Pemahaman

Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi tingkat kemajuan suatu daerah, maka sebenarnya tingkat pendidikan juga mempunyai pengaruh bagaimana cara masyarakat berfikir untuk kemajuan baik untuk pribadi maupun untuk bersama.

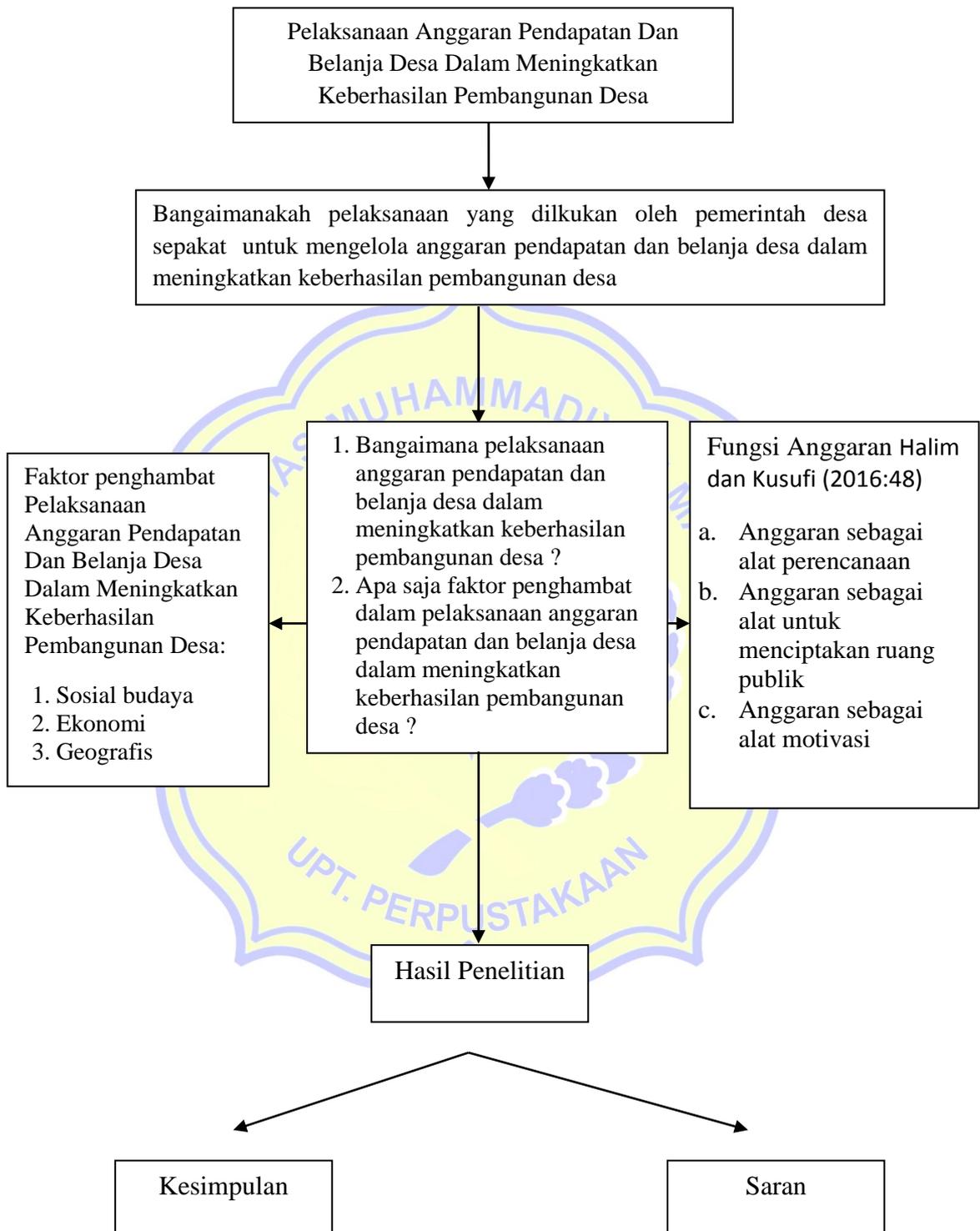
2) Keahlian dan kemampuan

Keahlian dan kemampuan yang dimiliki masyarakat akan mempengaruhi seluruh tingkatan dari masyarakat tersebut, yaitu dimana kemampuan dan keahlian akan membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada dalam pembangunan desa. Keahlian merupakan suatu modal yang dapat dimanfaatkan dalam suatu pembangunan. Spesialisasi kemampuan seseorang dapat sangat membantu dalam hal-hal tertentu yang belum tentu diketahui oleh orang lain.

3) Jenis Kelamin Masalah kesetaraan gender

Jenis Kelamin Masalah kesetaraan gender adalah hal yang cukup marak digalakkan dalam berbagai aspek pembangunan tidak terkecuali wilayah pedesaan, ini ditandai dalam program pembangunan yang harus melibatkan peran perempuan.

2.3 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2011:205), Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti akan meneliti mulai bulan Januari sampai selesai. Peneliti memilih lokasi penelitian di DESA SEPAKAT KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN.SUMBAWA.

3.3 Penentuan Informan

Peneliti akan menggunakan teknik *Purposive sampling* dan *Snowball sampling* sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. Menurut Sugiono (2011:244), *Purposive sampling* adalah adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Menurut Sugiono (2011:245), *Snowball sampling* adalah teknik penentuan infoman dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan penelitian adalah Kepala desa Desa Sepakat beserta stap dan warga yang ada di Desa Sepakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang lebih memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena sifatnya masyarakat yang menjadi subjek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak dijadikan informan penelitian. Para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah Kepala Desa Desa SEPAKAT, Stap dan warga yang ada di Desa SEPAKAT.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiono (2011:224), Pengamatan dilakukan untuk mencegah adanya keraguan pada peneliti, apakah data yang dijangkau terdapat kekeliruan atau bias. Pengamatan ini juga membantu penelitian pada saat teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. Teknik ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja desa dalam pembangunan Desa, yang ada di Desa SEPAKAT Kec.PLAMPANG.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (2011:231), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja desa dalam pembangunan Desa, yang ada di Desa SEPAKAT

KECAMATAN PLAMPANG. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen sangat penting untuk keperluan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Dokumen juga sebagai bukti untuk suatu pengujian.

Menurut Sugiono (2011:240), Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja desa dalam pembanguna Desa, yang ada di Desa SEPAKAT Kec. PLAMPANG.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Menurut Sugiono (2011:247), Untuk itu perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah melakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan

dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Menurut Sugiono (2011:249), Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiono (2011:253), Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

3.7 Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, peneliti akan menggunakan Teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan informan terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja desa dalam pembanguna Desa, yang ada di Desa

Sepakat Kecamatan Plampang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber.

Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain. Data dapat dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya.

